

**PERKEMBANGAN POLA TRANSFORMASI STRUKTUR PRODUKSI
REGIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

Nurhayani

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi IESP Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma.Bulian Km. 15
Mendalo Darat Jambi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola transformasi struktur ekonomi khususnya struktur produksi, perkembangan objek atau basis pajak dan dampak transformasi struktur produksi terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan sekunder berupa data PDRB Kabupaten Sarolangun tahun 2002 - 2012.. Pola transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Sarolangun mengalami peralihan, dari sektor primer ke sektor sekunder dan tertier. Dampak transformasi di kabupaten Sarolangun, Sub Sektor perhotelan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pajak hotel, Sub Sektor restoran berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pajak restoran, Sub Sektor hiburan dan rekreasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pajak hiburan, Sub Sektor listrik berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pajak penerangan jalan, sedangkan Sub Sektor penggalian tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan pola transformasi struktural, Kabupaten Sarolangun mengalami peralihan ke sektor non primer, diharapkan pemerintah dapat lebih menfokuskan program-program pada sektor-sektor yang mendominasi kontribusinya terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten tersebut.

Kata kunci : transformasi struktural

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah berlangsung selama lebih dari satu dekade sejak diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang selanjutnya masing-masing direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Sebagai konsekuensi dari implementasi desentralisasi fiskal, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian sumber penerimaan kewenangan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri khususnya pajak daerah. Kemampuan suatu daerah mengemban otonominya minimal dapat dilihat dari tiga unsur utama yaitu : (1) pemilikan sumberdaya alam seperti tanah, hutan, air, laut, bahan tambang, minyak dan gas bumi, dan sebagainya; (2) pemilikan sumber daya manusia tidak hanya jumlah tetapi juga kualitas yang tercermin dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, budaya, produktivitas dan sebagainya;

dan (3) kemampuan keuangan khususnya yang menjadi hak daerah untuk menggalinya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

1.2 Perumusan Masalah

PAD khususnya pajak sangat bergantung pada perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat dikenai pajak oleh pemerintah daerah yang tercermin dari transformasi struktur ekonomi khususnya struktur produksi regional. Permasalahan pokok yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Bagaimana pola transformasi struktur ekonomi khususnya struktur produksi, perkembangan objek atau basis pajak dan dampak transformasi struktur produksi terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Sarolangun.

1.3 Tujuan Penelitian

Beranjak dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui pola transformasi struktur ekonomi khususnya struktur produksi, perkembangan objek atau basis pajak dan dampak transformasi struktur produksi terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Sarolangun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Transformasi Struktural

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian wilayah. Transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor dan kesempatan kerja.

2.2 Faktor Penyebab Transformasi Struktural.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya transformasi ekonomi yaitu, pertama disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya. Sesuai dengan Hukum Engels bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian

sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi industri menjadi bertambah besar. Proses transformasi struktural akan berjalan cepat jika terjadi pergeseran pola permintaan domestik kearah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor.

2.3. Terjadinya Transformasi Struktural.

Sukirno (2006) menjelaskan bahwa, berdasarkan lapangan usaha maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan dalam tiga kelompok utama yaitu:

1. Sektor primer, yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalan.
2. Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan.
3. Sektor tertier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain (termasuk pemerintahan)

Pada umumnya, transformasi yang terjadi di negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri, atau terjadinya transformasi dari sektor primer kepada sektor non primer (sekunder dan tertier). kontribusi output dari sektor primer terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin mengecil sedangkan pangsa Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor sekunder dan tertier mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan nasional perkapita. Dengan demikian, transformasi ekonomi menunjukkan terjadinya peralihan kegiatan ekonomi dari perekonomian tradisional menjadi perekonomian yang modern.

2.4 Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia

1. Perubahan Struktur Ekonomi

Suatu proses pembangunan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disusul dengan suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat perubahan sejumlah aktor, bisa hanya dari sisi permintaan

agregat, sisi penawaran agregat atau dari kedua sisi pada waktu yang bersamaan (Tulus Tambunan, 1996).

2. Proses Transformasi Struktur Perekonomian Indonesia

Perkembangan ekonomi Indonesia selama masa 25 tahun berselang diteropong dari sudut pandang tentang pembangunan ekonomi sebagai proses transisi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh transformasi multidimensional dan menyangkut perubahan pada struktur ekonomi. Akan ditinjau beberapa pokok dalam perubahan struktur selama lima tahap Pelita (Pembangunan Jangka Panjang Tahap I) (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan sekunder dengan Data yang digunakan berupa data PDRB dan data Pajak Daerah Kabupaten Sarolangun. Sumber data diperoleh dari BPS, Dispenda dan web yang menyajikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan paket program komputer yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk mengetahui pola transformasi ekonomi di Kabupaten Sarolangun maka digunakan analisis deskriptif dengan melihat perkembangan dan pergeseran dari sektor pembentuk PDRB. Untuk Mengetahui Pengaruh Transformasi Ekonomi terhadap perkembangan basis dan penerimaan pajak di Kabupaten Sarolangun maka digunakan regresi dengan model sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e_i$$

Dimana:

Y : Penerimaan Pajak Kabupaten Sarolangun

X₁ : Sub sektor Hotel

X₂ : Sub Sektor Restoran

X₃ : Sub Sektor Penggalian

X₄ : Sub Sektor Listrik

X₅ : Sub Sektor Perdagangan

X₆ : Sub Sektor Transformasi

β₀ : Koefisien regresi

1. Sistematika Pengujian Hipotesis

A. Uji t

Merupakan pengujian signifikansi koefisien regresi

parsial dengan kriteria t statistik. Uji 2 arah dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2$$

$$H_a = \beta_1 \neq \beta_2$$

$$t_{hitung} = \frac{\beta_1}{Se(\beta_1)}$$

Dimana:

T : t-hitung

B₁ : koefisien regresi

Se : Estandar error

B. Uji F

Pada kasus regresi Berganda uji F berfungsi untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara bersama atau uji F menunjukkan signifikansi variable-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variable terikat. Nilai F-hitung dapat picaril dengan rumus sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (n - K)}$$

Dimana:

F_h : F hitung

R² : Koefisien determinasi

K : Jumlah Variabel bebas

N : Jumlah Sampel

2. Uji Asumsi Klasik

Penaksiran model regresi dalam penelitian ini menggunakan metode pangkat dua terkecil (Ordinary Least Square = OLS).

Metode ini memiliki beberapa keunggulan dibanding metode lainnya, karena ia memiliki sifat-sifat yang efisien yaitu varian minimum dan hasil estimasi tidak bias atau dikenal dengan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Uji Linearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model persamaan yang digunakan bersifat linear atau tidak, digunakan uji *Ramsey Reset Test*. Linearitas suatu model dapat dilihat dengan membandingkan nilai F-statistik dari hasil olahan *Ramsey Reset Test* dengan F-tabel dengan degree of freedom ($df = n-k-1$). Bila F-statistik lebih kecil dari nilai F-tabelnya, maka lolos dari adanya ketidaklinearan model.

3) Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah residualnya terdistribusi secara normal atau tidak sesuai dengan asumsi model regresi yang *best linear unbiased estimator* (BLUE) dari klasik adalah dengan membandingkan nilai Jarque-Berra dengan nilai tabel Chi-Square (X^2). Jika nilai Jarque-Berra-nya lebih kecil dari nilai tabel Chi-Square (X^2), maka dikatakan model lolos dari ketidaknormalan distribusi residual.

1) Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui lolos tidaknya model dari adanya serial korelasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai Obs*R-square hasil pengujian *Serial Correlation LM Test* dengan nilai tabel Chi-Square (X^2). Jika nilai Obs*R-square lebih kecil dari nilai tabel Chi-Square (X^2), maka lolos dari adanya autokorelasi (Syaparuddin, 2006).

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya korelasi yang pasti diantara variabel bebas, dimana dalam kondisi yang seperti ini variabel-variabel bebas tidak ortogonal. (Arief Sritua dalam Syaparuddin, 2006). Jika terdapat korelasi yang sempurna diantara sesama variabel bebas, dimana korelasinya sama dengan 1, maka konsekuensinya adalah(i) koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan(ii) nilai *standard error* setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. Jika dalam suatu penelitian dengan menggunakan regresi berganda nilai korelasi antar variabel bebas kurang dari 1 dari 1 maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi varian residual konstan, $\text{var}(\mu_i / X_i) = \sigma^2$, untuk semua variabel penjelas. Keberadaan heteroskedastisitas bagi penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten, tetapi penaksir tersebut tidak lagi efisien karena persyaratan varian minimum tidak terpenuhi sepenuhnya. Cara yang lazim digunakan untuk menghindari masalah heteroskedastisitas adalah melalui transformasi log dan proses pendeflasian variabel pengamatan (Maddala dalam Delis, 1995).

BAB IV ANALISIS DESKRIPTIF

4.1 Pola Transformasi Ekonomi di Kabupaten Sarolangun

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sarolangun dari tahun 2002 sampai tahun 2012 mengalami fluktuasi, rata-rata perkembangan PDRB adalah persen. Perkembangan kontribusi output terhadap PDRB dari sektor primer mengalami rata-rata perkembangannya sebesar 5,45 %

% pertahun dan sektor sekunder rata-rata perkembangannya sebesar 11,00 % pertahun dan sektor tertier rata-rata perkembangannya sebesar 7,34 % pertahun.

Kontribusi output dari masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel 4.3. Kontribusi output sektor primer tidak mendominasi kontribusi output terhadap pembentukan PDRB, kontribusi output terbesar disumbang oleh sektro sekunder dan diikuti oleh sektor tertier. Berdasarkan kontribusi output terhadap PRDB dari masing-masing sektor, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi transformasi dari sektor primer ke non primer, sektor yang dominan adalah sektor sekunder, hal ini memang di Kabupaten Sarolangun sub sektor industri pengolahan dan sub sektor konstruksi. Pada tabel 4.1 PDRB Kabupaten Sarolangun Atas Harga Konstan Tahun 2000 per Sektor Ekonomi Dalam Perekonomian Tahun 2002 – 2012 (terlampir).

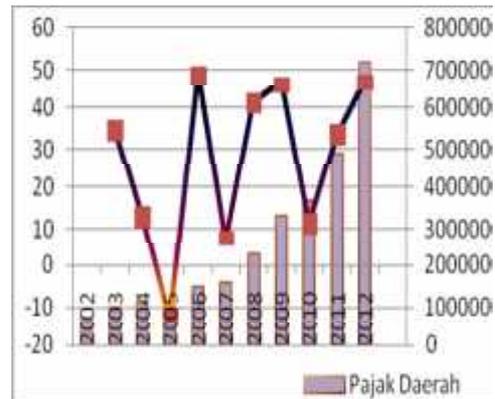
4.2. Perkembangan Objek atau Basis Pajak Daerah Kabupaten Sarolangun

Sarolangun merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang berhasil, Kabupaten Sarolangun memiliki banyak potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum di maksimalkan baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah, hal ini terlihat dari masih besarnya kontribusi penerimaan daerah yang sah didalam pembentukan PAD. Kabupaten ini memiliki banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dikembangkan, meskipun memiliki potensi yang besar, tetapi penerimaan PAD dari pajak daerah ini masih tergolong kecil, sementara kondisi saat ini menuntut daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah tersebut.

Pajak daerah dikabupaten Sarolangun secara rata –rata selama tahun 2002 – 2012 mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2005 dan 2007 terjadi penurunan penerimaan pajak. Penurunan pajak terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar 9.23% yang disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari pajak hiburan; pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Pada tahun 2007 juga terjadi penurunan sebesar 0.82% yang disebabkan oleh menurunnya pajak

penerangan jalan sebesar 5.4% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 60.14% dari tahun sebelumnya disusul tahun 2009 sebesar 55.07% dari tahun sebelumnya. Ditahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari penambahan kontribusi yang berasal dari pajak parkir dan pajak air tanah.



Grafik 4.1. Perkembangan Pajak Daerah Kab. Sarolangun Tahun 2002 – 2012

Perkembangan pajak daerah setiap tahun mengalami sangat fluktuatif ini mencerminkan kurang optimalnya daerah dalam memungut dan mengoptimalkan pajak daerah yang ada. Pada tahun 2003 terjadi peningkatan sebesar 34.51% dari tahun sebelumnya,

penurunan pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar 12.72% dari tahun sebelumnya, penurunan ini disebabkan oleh menurunnya beberapa komponen pajak seperti pajak reklame; pajak penerangan jalan dan pajak bahan galian golongan C. Pada tahun 2006 pajak daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 48.50% dari tahun sebelumnya, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pajak reklame sebesar 50% dan pajak bahan galian golongan C sebesar 85%. Pada tahun 2007 pajak daerah juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hanya saja pertumbuhan pajak daerah pada tahun tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Bila dilihat dari basis pajak daerah itu sendiri, pajak restoran dan pajak reklame merupakan basis pajak yang mempunyai potensi yang sangat besar dioptimalkan. Ini bisa dilihat dengan banyaknya jumlah restoran dan warung makan yang ada di Kabupaten Sarolangun dan pesatnya perkembangan kab ini karena merupakan kabupaten yang penghubung kedaerah lain.

Tabel 4.2 Rata - rata Pertumbuhan Pajak Daerah Kab. Sarolangun Tahun 2002 - 2012 (%)

Pajak Daerah	Rata - rata Pertumbuhan		
	2002 - 2005	2006 - 2009	2010 - 2012
Pajak Hotel	24.92	35.70	108.69
Pajak Restoran	24.71	549.95	23.12
Pajak Hiburan	20.36	104.80	-21.76
Pajak Reklame	-0.06	57.91	14.73
Pajak Penerangan Jalan	36.82	25.02	26.87
Pajak Parkir			-8.33
Pajak Air Tanah			31.51
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.95	56.41	28.90
BPHTB			195.36

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat beberapa basis pajak daerah yang baru dipungut pada tahun 2010 - 2011, pajak tersebut adalah pajak parkir; pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2002 - 2005 pertumbuhan pajak daerah terbesar dimiliki oleh pajak penerangan jalan sebesar 36.82% disusul dengan pajak hotel sebesar 24.92% dan pajak restoran sebesar 24.71%. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2006 - 2009 dengan rata - rata pertumbuhan terbesar diberikan oleh pajak restoran sebesar 549.95% disusul dengan pajak hiburan sebesar 104.80% dan pajak reklame sebesar 57.91%. Peningkatan pajak restoran ini disebabkan oleh banyaknya

bermunculan restoran dan warung makan yang ada di kab Sarolangun dan memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan hiburan di kabupaten tersebut.

Pada tahun 2010 – 2012 terjadi perbedaan pada pertumbuhan pajak daerah, basis pajak yang mempunyai pertumbuhan rata –rata tertinggi adalah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak hotel sebesar 108.69%, tingginya pertumbuhan pajak hotel ini disebabkan mulai menggeliatnya usaha perhotelan di Kabupaten Sarolangun karena mulai banyaknya para pengunjung kedaerah ini serta dibukanya hotel Abadi di Kabupaten ini.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

5.1. Dampak Transformasi Struktur Produksi Terhadap Perkembangan Basis dan Penerimaan Pajak di Kabupaten Sarolangun

5.1.1. Pajak Hotel dan Subsektor Hotel

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa subsector hotel

di Kabupaten Sarolangun berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel pada taraf 5% yang diketahui dari nilai t sebesar 6.023 dan sig sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Konstanta sebesar 1.360, ini berarti jika sub sektor perhotelan tidak mengalami perubahan maka pajak hotel akan mengalami peningkatan sebesar 1.360%, dari nilai koefisien regresi diperoleh hasil sebesar 1.085 ini berarti jika terjadi peningkatan 1% sub sektor perhotelan maka pajak hotel juga akan mengalami peningkatan sebesar 1.085%. Koefisien determinasi sebesar 0.801 ini berarti 80.1% pajak hotel dipengaruhi oleh sub sektor hotel dan sisanya 19.1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

5.1.2. Pajak Restoran dan Subsektor Restoran

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan diketahui subsector restoran mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak restoran pada taraf 5% yang dapat dilihat dari nilai t sebesar 9.098 dan sig sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Konstanta sebesar -22.070 ini berarti jika sub sektor restoran tetap maka

pajak restoran akan mengalami penurunan sebesar 22.070%. Koefisien regresi sebesar 6.090 ini berarti jika sub sektor restoran mengalami meningkat 1% maka pajak restoran juga akan mengalami peningkatan sebesar 6.090%. Koefisien determinasi sebesar 0.902 ini berarti 90.2% pajak restoran dipengaruhi oleh sub sektor restoran sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

5.1.3. Pajak Hiburan dan Subsektor Jasa Hiburan dan Rekreasi

Sub sektor hiburan berpengaruh signifikan terhadap pajak hiburan yang dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dengan th 5.275 dengan sig sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 0.005. Konstanta sebesar -6.022 ini berarti bila sektor jasa hiburan dan rekreasi tetap maka pajak hiburan akan mengalami penurunan sebesar 6.022%. Koefisien regresi sebesar 3.569 yang berarti peningkatan 1% sektor jasa hiburan dan rekreasi akan meningkatkan pajak hiburan sebesar 3.569%. Nilai Koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 0.756 yang berarti 95.6%% pajak

hiburan dipengaruhi oleh sub sektor jasa hiburan dan rekreasi sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

5.1.4. Pajak Penerangan Jalan dan Subsektor Listrik

Nilai th diperoleh sebesar 10.586 dengan sig sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, ini berarti subsector listrik mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak penerangan jalan dengan taraf 5%. Konstanta sebesar 1.511 ini berarti jika sektor listrik tetap maka pajak penerangan jalan akan meningkat sebesar 1.511 %. Nilai Koefisien regresi sebesar 1.374 ini berarti jika terjadi peningkatan 1% pada sub sektor listrik akan meningkatkan pajak penerangan jalan akan meningkat pula sebesar 1.374%. Koefisien determinasi menunjukkan sebesar 0.926 ini berarti 92.6% pajak penerangan jalan Kota Jambi dipengaruhi oleh sub sektor listrik sedangkan sisanya 7.4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

5.1.5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Subsektor Penggalian

Uji hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa subsector penggalian

tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan pada taraf 5% yang dilihat dari yang dapat dilihat dari nilai nilai t sebesar 2.109 dan sig sebesar 0.064 yang lebih besar dari 0.05. Konstanta diperoleh 2.859, ini berarti jika sub sektor penggalan tidak mengalami perubahan maka pajak mineral bukan logam dan batuan akan meningkat sebesar 2.859%, untuk koefisien regresi sebesar 0.635, ini berarti jika sub sektor penggalan meningkat 1% maka pajak mineral bukan logam dan batuan akan mengalami penurunan sebesar 0.635%. Untuk Nilai Koefisien determinasi diperoleh angka sebesar 0.331 yang berarti 33.1% pajak mineral bukan logam dan batuan dipengaruhi oleh sub sektor penggalan sedangkan sisanya 66.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pola transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Sarolangun mengalami kabupaten Sarolangun, pajak hotel dan restoran dan pajak reklame merupakan potensi basis pajak yang sangat besar dan semakin berkembang. Pajak penerangan jalan juga merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PAD kabupaten Sarolangun.

Dampak transformasi di Kabupaten Sarolangun, Sub Sektor perhotelan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pajak hotel, Sub Sektor restoran berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pajak restoran, Sub Sektor hiburan dan rekreasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pajak hiburan, Sub Sektor listrik berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pajak penerangan jalan, Sub Sektor penggalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan.

6.2 Saran

1. Berdasarkan pola transformasi struktural, Kabupaten Sarolangun mengalami peralihan ke sektor non primer, diharapkan pemerintah dapat lebih menfokuskan program-program pada sektor-sektor yang mendominasi kontribusinya terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten tersebut.
2. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, memegang peranan dan pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sub sektor yang signifikan dan besar kontribusinya terhadap penerimaan daerah diantaranya sub sektor perhotelan, restoran, listrik dan hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

Djojohadikusumo, Soemitro
(1993), Dasar Teori
Ekonomi Pertumbuhan
dan Ekonomi
Pembangunan, LP3ES,
Jakarta.

Tambunan, Tulus. T.H. (1996).
Perekonomian
Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

**Sukirno.. Mandala dalam
arman delis Arif sritua...**

Lampiran
tabel Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Sarolangun Atas Harga Konstan Tahun 2000 per
Sektor Ekonomi Dalam Perekonomian Tahun 2002 – 2012

Tahun	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor tertier
	Perkembangan (%)	Perkembangan (%)	Perkembangan (%)
2002	-	-	-
2003	3,71	15,95	5,53
2004	4,19	20,02	5,35
2005	3,04	16,84	6,39
2006	6,71	2,17	11,97
2007	5,90	8,37	9,48
2008	6,62	10,94	9,31
2009	9,34	7,18	5,88
2010	8,26	12,09	6,47
2011	6,53	15,55	10,68
2012	5,97	11,95	9,65
Rata-rata	5,45	11,00	7,34